SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR /KM.6/WKN.17/[Tahun Terbit]

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

PADA [NAMA K/L]

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;

b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada [Kementerian Pemohon];

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

5. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah ~~beberapa kali~~ diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019;

7. Keputusan...

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 666/KMK.01/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

Memperhatikan : Surat [Jabatan Pemohon] ~~[Nama Satker]~~ Nomor [Nomor Surat Permohonan] tanggal [tanggal surat Permohonan] ~~tentang~~ hal [Perihal Surat Permohonan];

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA [Nama K/L].

PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa [Jenis BMN] sejumlah [Jumlah Unit] unit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini sebagai Barang Milik Negara pada ~~Kementerian Keuangan~~ [Nama K/L].

KEDUA : Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp[Total Nilai BMN] [(Huruf Total Nilai BMN].

KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.

KEEMPAT : [Nama K/L] dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.

KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh [Nama K/L] menjadi tanggung jawab [Nama K/L].

KETUJUH...

KETUJUH : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. ~~[Daftar Nama Tembusan 1]~~Menteri Keuangan;

2. ~~[Daftar Nama Tembusan 1]~~ [Jabatan Pemohon];

3. [Daftar Nama Tembusan 1];

4. [Daftar Nama Tembusan 2];

5. [Daftar Nama Tembusan 3];

5. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;

6. Kepala Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku;

7. ~~[Nama Satker];~~

8. Kepala KPKNL [Nama KPKNL].

Ditetapkan di Jayapura

pada tanggal [Tanggal Cetak]

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

[Plh/Plt] KEPALA KANWIL DJKN

PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU,

[Nama Kepala Kantor].

Ditetapkan di Jayapura

pada tanggal [Tanggal Cetak]

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

[Plh/Plt] KEPALA KANWIL DJKN

PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU,

ttd

[Nama Kepala Kantor]

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

[Jabatan Salinan]

[Nama Salinan]

NIP [NIP Salinan]